

STRATEGI PENURUNAN TINGKAT KEMISKINAN DI KABUPATEN PIDIE: ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH

Muhammad Rafsanjani

Mahasiswa Prodi S-II Ekonomi Syariah, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry,
Banda Aceh.

E-mail: 201008016@student.ar-raniry.ac.id

Harir Rizky Tullah

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.

E-mail: harirrizky@gmail.com

Abstract

Poverty is a multidimensional problem dealt by a country. Pidie district in Aceh province, Indonesia is a real sample that has a high poverty rate. This poverty problem is caused by various indicators, but in this case a structured and targeted policy is needed so that it can solve this problem. The purpose of this research is to find out the policies of the Pidie district government, the implementation of policies in overcoming the poverty and to find out the policies of the Pidie government that have been successful and effective in solving poverty problems. The research method in this writing uses a qualitative descriptive method. Data were obtained from observation, interviews and documentation. The results of the study identified that the Pidie Government's policy in overcoming poverty was structured in various strategies, namely Special Strategies, namely: Right Focus, Right Locus, Right Mode, Right Target, Right Amount and Right Time. The policies taken include dimensions that are considered to be indicators of poverty, namely the dimensions of health, food, infrastructure, employment and education. The implementation of the Pidie Government's policies in overcoming poverty is arranged based on predetermined indicators such as the provision of individual land, procurement of technological facilities and infrastructure, scholarships for poor children/teams, construction of school buildings, provision of non-formal education facilities and infrastructure, Pidie community health insurance, assistance for tools for people with disabilities, hospital referral services, regional development areas, independent village development, market operations, road construction, bridge construction, livable houses and so on.

Keywords: Policy, Poverty, Pidie District

1. Pendahuluan

Pemimpin suatu negara harus mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa dalam kehidupan ekonominya dengan berbagai kebijakan dan terobosan yang dilaksanakan Pemerintah. Hal ini merupakan proses dalam meminimalisir tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia. Kemiskinan menjadi suatu persoalan global yang dihadapi oleh setiap negara dunia dalam menuju kesejahteraan penduduknya (Nasution, Nasution, dan Lubis 2020). Masalah kemiskinan menjadi fokus penting di Indonesia, pemerintah selaku pemangku kebijakan terus

berupaya untuk menekan angka kemiskinan dikarenakan kemiskinan dapat memunculkan berbagai persoalan sosial, ekonomi, politik dan lain sebagainya ditengah kehidupan masyarakat (Purwanto 2007). Sejauh ini, masalah kemiskinan menjadi pembahasan hangat dan menjadi suatu pokok bahasan penting semenjak era kolonial Belanda. Saat itu, pengentasan kemiskinan diatasi dengan berbagai program anti kemiskinan melalui kebijakan-kebijakan yang disebut “*Politik Etis*” (Itang 2015).

Kemiskinan adalah konsep yang multidimensional, hal ini dikarenakan kemiskinan mempunyai berbagai dimensi dalam kehidupan sehingga juga sering disebut bahwa kemiskinan mempunyai konsep berdimensi ganda yang memuat dimensi ekonomi, politik serta dimensi sosial – psikologis (Huraerah 2013). Jika ditinjau dari sisi dimensi ekonomi, kemiskinan dapat diartikan sebagai kurangnya sumberdaya yang bisa dipergunakan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya serta terjaminnya kesejahteraan umat manusia. Kemiskinan dalam kacamata politik dapat dikaji melalui tingkat akses terhadap kekuasaan ataupun yang sering disebut dalam konsep sistem politik dimana dapat dipergunakan dalam melihat kemampuan dan mengakses sumberdaya yang ada.

Adapun kemiskinan dalam kacamata dimensi sosial psikologis yaitu kemiskinan dari sisi kurangnya akses dan tatanan kehidupan sosial yang mendukung untuk proses meningkatkan produktivitas. Pada bidang ini, terjadinya kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor yang menghambat seseorang dalam memanfaatkan kesempatan dalam lingkungan kehidupan masyarakat (Huraerah 2013). Berbagai upaya pemerintah dalam kebijakannya menanggulangi kemiskinan telah dimulai sejak orde baru. Tahun 1976 sampai dengan tahun 1996 ataupun yang sering disebut dengan repelita II-V, Indonesia mengalami penurunan kemiskinan secara drastis dari 40 persen pada repelita II menjadi 11 persen diawal repelita V. Hal ini menjadi keberhasilan negara dalam melakukan berbagai pembangunan bidang ekonomi. Selama tiga dekade, pertumbuhan ekonomi negara diatas 7 persen setiap tahunnya. Pencapaian gemilang tersebut menarik perhatian dunia dan negara mendapat berbagai pujian atas pencapaian dalam mengurangi angka kemiskinan. Sebagai contoh, laporan dari World Bank “*The East Asian Miracle*”, Indonesia menempati posisi sebagai salah-satu macan Asia yang dimuat dalam “*The High Performing Asian Economies (HPAEs)*” dimana sejajar dengan negara Malaysia, Singapura, Taiwan, Korea Selatan dan Taiwan. Purwanto, Mengkaji Potensi Usaha, 296.

Tidak berselang lama laporan dari Wolrd Bank tersebut, tahun 1997 Indonesia dilanda krisis ekonomi. Awalnya, krisis ini hanya sekilas tentang menurunnya rupiah terhadap dolar Amerika, akan tetapi berlanjut dengan tidak dapat dikendalikan oleh pemerintah hingga terjadinya krisis politik yang ditandai dengan jatuhnya kepemimpinan presiden Soeharto pada 1998. Krisis moneter tersebut kemudian membesar hingga terjadinya krisis total yang melanda dalam semua aspek kehidupan masyarakat. Purwanto, Mengkaji Potensi Usaha. 296.

Pidie merupakan salah-satu kabupaten dengan jumlah angka penduduk yang besar di Aceh. pada tahun 2020, jumlah penduduk di Kabupaten Pidie berjumlah 435.275.00 jiwa. Tahun 2021, jumlah penduduk kembali meningkat pada angka 439.398.00 jiwa dan pada tahun 2022 mencapai 444.500.00 jiwa. Dengan jumlah tersebut, pada tahun 2022, Kabupaten Pidie

menjadi daerah dengan jumlah penduduk terbanyak peringkat dua setelah Kabupaten Aceh Utara (Rachman 2014). Angka kemiskinan di Kabupaten Pidie menunjukkan kenaikan pada tahun 2017 dibandingkan dengan 2016 yaitu meningkat menjadi 21,43 persen akan tetapi pada Tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 20,47 dan Tahun 2019 menurun menjadi 19,46 persen serta pada tahun 2020 sedikit menurun sebesar 19,23. Hal ini terlihat dari data-data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) (Fachrudin 2015). Namun demikian pemerintah daerah masih terus berupaya agar semua keluarga miskin bisa terangkat taraf hidupnya dan berusaha menurunkan angka kemiskinan.

Sejak tahun 1998/1999, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengadakan program untuk penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan dengan nama Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Tahun 2007 skala cakupan diperluas dengan nama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), selanjutnya pada Tahun 2014 PNPM-MPd berakhir, dengan pertimbangan salah satunya pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan alokasi Dana Desa sehingga seluruh sumber dana program-program Pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat ditarik. Pemerintah Kabupaten Pidie melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Pidie telah melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM Mandiri Perdesaan Menjadi BUMDes Bersama. Kegiatan ini bertujuan untuk mempercepat Pembentukan BUMDes Bersama sesuai dengan arahan Permendesa No. 15 Tahun 2021 dan atas dasar perintah Gubernur Aceh turunan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Ri Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta PP No. 11 2021 dan UU No. 11 Tahun 2020. Program ini juga tentunya menjadi suatu terobosan ataupun strategi dalam percepatan pengentasan kemiskinan.

Kepala BPS Kabupaten Pidie, Dara Dian menyebutkan bahwa terhitung dari 2013 sampai 2023 angka kemiskinan di wilayah Pidie mengalami penurunan sebanyak 2,34%. Adapun data ini diukur dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran) (Badan Pusat Statistik Aceh 2022). Disisi lain, upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah yaitu memfokuskan pembangunan pada bidang Pertanian, Perkebunan dan Perikanan. Ketiga sektor ini difokuskan dikarenakan merupakan sumber utama dari pendapatan daerah, selain itu juga sejalan dengan visi misi Bupati yaitu Blang, Glee, Laot. Dilanjutkan pula dengan berbagai program pembangunan yang dilaksanakan oleh PJ Bupati Pidie saat ini yang diharapkan dapat mencapai kesejahteraan pada masyarakat dan dapat menekan angka kemiskinan.

Namun hasil observasi yang telah penulis laksanakan, kebijakan-kebijakan dari pemerintah Kabupaten Pidie belum sepenuhnya maksimal untuk menekan permasalahan kemiskinan. Sebagai contoh, kebijakan dalam pendidikan dan ekonomi masih stagnan, pembangunan infrastruktur yang masih rendah, kebijakan dan pelayanan kesehatan yang masih belum mumpuni sehingga ini menjadi problem tersendiri bagi Pidie untuk bebas dari kemiskinan, beberapa aspek diatas juga menjadi faktor penting dalam pengentasan kemiskinan dan idealnya menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Pidie.

Berdasarkan paparan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji secara spesifik tentang pemberantasan kemiskinan di Kabupaten Pidie dengan judul **“Efektivitas Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pidie dalam Mengurangi Angka Kemiskinan”**. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengekspolasi terkait dengan kebijakan pemerintah dan implementasinya dalam mengurangi angka kemiskinan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu kajian akademik dalam menjawab berbagai kebijakan yang diambil pemerintah terkhususnya pada aspek ekonomi untuk menekan angka kemiskinan di Kabupaten Pidie. Diharapkan tulisan ini akan menjadi masukan bagi pemerintah dan stakeholder lainnya dalam pembangunan untuk pengentasan kemiskinan dan menunjang kesejahteraan di Kabupaten Pidie.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif (Novita et al. 2022). Data yang diperoleh bersumber dari hasil studi lapangan (*field reasearch*) dan kajian kepustakaan (*library researh*). Penulis akan mengkaji berbagai literatur seperti buku, artikel jurnal, media cetak dan media online serta sumber lainnya yang memiliki korelasi dengan tema yang dibahas. Adapun metode ini berfungsi untuk melihat bentuk manajemen sarana dan prasarana yang dilaksanakan oleh TK Khalifah Aceh 2. Dalam penelitian ini terdapat informan yaitu 3 orang guru yang mengajar pada TK Khalifah Aceh 2 Kota Banda Aceh. Untuk menghasilkan data yang valid, maka terdapat 2 (dua) jenis data yaitu data primer dan data sekunder (Sugiarto, 2015), upaya untuk mengumpulkan data menggunakan metode Wawancara (Sugiyono, 2017). Adapun teknik yang dilaksanakan dalam menganalisis data yaitu: 1) menghimpun data, 2) mereduksi data, 3) penyajian data, dan 4) penarikan kesimpulan (Raco, 2010).

3. Hasil dan Pembahasan

Kemiskinan menjadi suatu permasalahan multidimensi yang sangat kompleks pada suatu daerah atau negara. Kemiskinan menjadi suatu permasalahan penting yang harus mempunyai suatu prioritas dalam penyelesaiannya, dalam hal ini, tentunya diperlukan berbagai kajian serta kebijakan untuk mengatasi kemiskinan. Dalam hal menentukan kebijakan terkait, sangat diperlukan suatu analisis determinan kemiskinan (masalah pokok kemiskinan) agar kebijakan yang diambil tepat sasaran. Demikian halnya di Kabupaten Pidie, pemerintah Pidie memerlukan suatu pedoman dan hasil analisa yang bersifat komprehensif serta memerlukan suatu kerjasama antar stakeholder yang menyeluruh agar dapat melahirkan kebijakan yang efektif dan tepat serta dapat menyelesaikan secara spesifik berbagai persoalan kemiskinan.

Jika melihat penyebab kemiskinan yang terjadi di Aceh, konteks tren kenaikan kemiskinan secara umum terjadi dikarenakan 5 (lima) faktor permasalahan diantaranya yaitu: (1) Rendahnya pertumbuhan ekonomi dan iklim usaha, (2) Kurangnya akses penduduk miskin terhadap program perlindungan sosial dan layanan dasar, (3) Rendahnya kualitas SDM penduduk miskin, (4) Tingginya biaya transaksi ekonomi, dan (5) Tingginya harga bahan

kebutuhan pokok strategis (TKP2K Aceh, 2018). Demikian juga halnya dengan yang terjadi di Kabupaten Pidie.

3.1 Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pidie Dalam Menurunkan Angka Kemiskinan

Dalam proses melihat berbagai kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah Kabupaten Pidie, maka *design* dan *delivery* program penanggulangan kemiskinan tidak hanya bersifat konvensional, tetapi mesti bersifat mendasar dan sampai kepada hal yang bersifat prinsipil. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Achmad Mulyana selaku Kabid Perencanaan dan Anggaran Bappeda Kabupaten Pidie bahwasanya:

“Program yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Kabupaten Pidie tentunya diupayakan harus terarah sesuai dengan rencana yang sudah disusun, terkait program tersebut tentu sudah ada kajian dan evaluasi sehingga diharapkan dapat menyelesaikan problematic kita yaitu kemiskinan, program-program tersebut sudah kita susun dalam RKPD ya”¹

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kabupaten Pidie terus berupaya untuk mengentaskan kemiskinan dengan program-program yang telah disusun dan diharapkan tepat sasaran. Achmad Mulyana juga menjelaskan bahwa:

“Kemiskinan di Aceh disebabkan oleh berbagai indikator namun kan berbeda-beda disetiap kabupaten/kotanya. Sehingga kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah kabupaten kota juga berbeda beda sesuai dengan daerah dan kebutuhan didalamnya.”²

Hasil dari wawancara diatas juga selaras dengan uraian dalam RKPD Kabupaten Pidie Tahun 2022-2026 yang menjelaskan terkait dengan program pengentasan kemiskinan ditinjau dari 5 Bidang yaitu: 1) Pendidikan, 2) Kesehatan, 3) Infastruktur, 4) Ketenagakerjaan dan 5) Pangan. Berikut turunan program atau kebijakan dari Logika Program berdasarkan *Theory of Change* yang diimplementasikan oleh pemerintah Kabupaten Pidie dalam mengentaskan kemiskinan.(Pidie 2022)

1. Bidang Pendidikan

Bidang pendidikan menjadi salah satu aspek penting dalam pengentasan kemiskinan. Melalui dengan program pendidikan ini, diharapkan agar dapat meminimalisir dan menekan laju kemiskinan di Kabupaten Pidie. Adapun kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Pidie yaitu: Program Pengelolaan Pendidikan dan Program Pendidikan dan Tenaga

¹ Wawancara dengan Achmad Mulyana selaku Kepala Bidang Perencanaan dan Penganggaran Bappeda Kabupaten Pidie pada 27 April 2024 di kantor Bappeda Pidie.

² Wawancara dengan Achmad Mulyana selaku Kepala Bidang Perencanaan dan Penganggaran Bappeda Kabupaten Pidie pada 27 April 2024 di kantor Bappeda Pidie.

Pendidik. Program ini bertujuan untuk Meningkatkan Kualitas dan Mutu Pendidikan PAUD dan Pendidikan Dasar, Angka Partisipasi Murni SD/MI, Angka Partisipasi Murni SMP/Mts, Angka Partisipasi Kasar SD/MI, Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs, Angka Partisipasi Kasar TK/PAUD, Angka Putus Sekolah SD, Angka Putus Sekolah SMP, Angka Lulusan SD dan Angka Lulusan SMP.

Merespon tujuan diatas, pemerintah berupaya merealisasikan melalui Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga. Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.

2. Bidang Kesehatan

Dalam mewujudkan turunnya angka kemiskinan di Pidie, pemerintah dalam hal ini mengambil kebijakan pada bidang kesehatan antara lain yaitu:

- a) Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
- b) Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan
- c) Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman
- d) Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
- e) Bantuan untuk peningkatan kesehatan masyarakat (CSR).

Program kebijakan yang diambil ini guna untuk: 1) Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu, 2) Anak dan gizi masyarakat, 3) Angka kematian ibu (AKI), 4) Angka kematian bayi (AKB) dan 5) Persentasi stunting.

3. Bidang Infrastruktur Dasar

Dalam dimensi atau bidang infrastruktur dasar, terdapat 6 kebijakan yang akan dilaksanakan yaitu sebagai berikut:

- a) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limba
- b) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- c) Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
- d) Pembangunan Sarana Dan Prasarana Umum (CSR)
- e) Program Jamban Keluarga/Sanitasi (Baznas)
- f) Rumah Layak Huni/ Mahyani (Baznas)

Adapun kebijakan ini disusun dengan mengikuti kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota, pengelolaan dan pengembangan sistem air minum (spam) di daerah kabupaten/kota dan kegiatan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten /kota.

4. Bidang Ketenagakerjaan

Dalam dimensi ketenagakerjaan, pemerintah Kabupaten Pidie menyusun kebijakan yang dirumuskan dalam 7 kerangka program yaitu sebagai berikut:

- a) Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
- b) Program Penempatan Tenaga Kerja
- c) Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
- d) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro

- e) Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
- f) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap; Dan Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
- g) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan

Adapun keseluruhan kebijakan diatas ditujukan kepada harapan capaian terhadap meningkatnya lulusan pelatihan kerja yang memiliki keterampilan/ kompetensi, Meningkatnya kesempatan kerja dan pertumbuhan industry.

5. Bidang Pangan

Dalam dimensi ini, pemerintah Kabupaten Pidie melaksanakan 5 program yaitu sebagai berikut:

- a) Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
- b) Belanja program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- c) Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
- d) Program Penyuluhan Pertanian
- e) Program Pusat

Kebijakan diatas disusun guna mencapai tujuan agar meningkatnya penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, meningkatnya penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, kapasitas SDM dan kelembagaan pertanian.

Adapun agenda diatas merupakan program yang dijalankan oleh Pemerintah Aceh untuk melihat penyebab terjadinya kemiskinan dalam masyarakat sehingga pemerintah dapat membuat kebijakan-kebijakan dalam menanggulangnya. Hal senada juga seperti yang diungkapkan oleh Mahfuddin Ismail selaku Ketua DPRK Pidie bahwasanya:

“Ya kalau untuk soal kemiskinan ini kan luas sekali, maksudnya kemiskinan ini dia sifatnya semua aspek gitu ya, multidimensi. Kami pihak pemerintah khususnya dari DPR akan terus berupaya menekan angka kemiskinan melalui fungsi kami. Kalau untuk berbagai program yang berkaitan dengan kemiskinan itu tidak pernah kami tolak, selalu kita dukung ya, agar persoalan kemiskinan dikita ini dapat diselesaikan walau harus melalui berbagai tahap dan waktu”³

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pihak pemerintah Kabupaten Pidie telah berupaya untuk melaksanakan berbagai program yang menyentuh masyarakat dan diharapkan dapat menyelesaikan problematika kemiskinan ini. Adapun pihak pemerintah terkhusus dari legislatif juga turut mengambil andil dalam menyelesaikan persoalan kemiskinan seperti mendukung program yang diajukan oleh eksekutif untuk program pengentasan kemiskinan di Pidie. Hal senada juga diperkuat oleh Achmad Mulyana yang menjelaskan bahwa:

³ Wawancara dengan Mahfuddin Ismail selaku Ketua DPRK Pidie pada 25 April 2024 di Kabupaten Pidie.

“Untuk program kemiskinan ini, kita mengumpulkan data-data dari pihak terkait, kemudian nanti akan dirumuskan oleh pemerintahan dimana kebijakan tersebut akan mempunyai turunan berupa agenda atau aksi yang dijalankan di untuk mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Pidie ya, kita juga ada grand theory dan kebijakan yang disusun didalamnya meliputi berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, pangan dan lain lain. Jadi secara pemerintahan baik dari kita dan legislatif sama sama berupaya untuk pengentasan kemiskinan di Pidie”.⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasanya pemerintah yang dalam hal ini adalah eksekutif dan legislatif secara bersama sama melaksanakan dan berperan dalam pengentasan kemiskinan dari berbagai program dan kebijakan didalamnya. Oleh pihak eksekutif juga memiliki road map program pengentasan kemiskinan dan oleh pihak legislatif turut hadir mendukung program pengentasan kemiskinan ini. Berbagai kebijakan ini telah disusun dalam RPKD Kabupaten Pidie tahun 2022-2026.

Dari berbagai analisis tentang kondisi dan karakteristik kemiskinan yang telah penulis urai sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa indikator penentu persentase penduduk miskin adalah garis kemiskinan. Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan bahwa komoditi makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada garis kemiskinan, baik diperkotaan maupun di pedesaan pada umumnya bersifat sama antara lain yaitu: Beras, yang memberikan sumbangan sebesar 18,33% diperkotaan dan 25,15% di pedesaan. Sementara itu, Rokok Kretek Filter memberikan sumbangan terbesar kedua terhadap garis kemiskinan yaitu 13,19% diperkotaan dan 9,85% dipedesaan. Komoditi berikutnya adalah ikan tongkol/tuna/cakalang yaitu 6,42% diperkotaan dan 5,41% dipedesaan. Adapun komoditi bukan makanan, biaya perumahan juga memberikan sumbangan terbesar terhadap garis kemiskinan yaitu 5,70% diperkotaan dan 4,79% dipedesaan. Komponen berikutnya adalah bensin yaitu 4,68% di perkotaan dan 4,09% dipedesaan dan listrik yaitu 3,49% diperkotaan dan 1,76% dipedesaan.

Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK) yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), terlihat bahwa peranan komoditi makanan lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan). Besarnya sumbangan GKM terhadap GK pada September 2018 sebesar 75,91% (72,53% diperkotaan dan 77,58% dipedesaan), sedangkan pada Maret 2018 sebesar 76,04%. Mengacu pada kondisi ini, Pemerintah Aceh serta pemerintah Kabupaten Kota tidak terkecuali Pemerintah Pidie, perlu melakukan intervensi-intervensi khusus untuk menjaga stabilitas bahan dan barang kebutuhan pokok, baik makanan maupun non makanan terutama yang diindikasikan berkontribusi terhadap Garis Kemiskinan. (Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TKP2K) Aceh 2019, 65–69)

“Sebenarnya untuk melihat bahwa masyarakat miskin dapat dilihat dari standar konsumsinya yaitu berada dibawah 2.100 Kilo kalori, itu yang dikatakan miskin. Kalau

⁴ Wawancara dengan Achmad Mulyana selaku Kepala Bidang Perencanaan dan Penganggaran Bappeda Kabupaten Pidie pada 27 April 2024 di kantor Bappeda Pidie.

untuk program, sebenarnya banyak dikarenakan semua program itu berkaitan seperti BPNT, bantuan subsidi listrik seperti di Sabang. Kita melihat dari efektivitas program yang dijalankan itu.”⁵

Wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa untuk melihat kemiskinan, pemerintah melalui BPS melakukan program untuk melihat standar konsumsi yang terjadi dalam masyarakat Aceh terkhususnya Kabupaten Pidie. BPS memiliki data dan menilai bahwa jika konsumsi masyarakat masih di bawah 2.100 Kilo kalori, maka dapat dikelompokkan kedalam masyarakat miskin. 2.100 Kilo kalori ini dikonversikan kedalam bentuk rupiah. Inilah sebagai standar kemiskinan yang dinilai oleh pemerintah.

“Ada 3 tingkatan yaitu tidak miskin, miskin dan sangat miskin. Jadi kadus yang menentukan. Setelah itu baru petugas turun ke lapangan dan mendata dengan kuisisioner. Pertanyaannya itu akan ditanyakan terkait pendidikan, bantuan sosial dan lain sebagainya. Dari situlah hasilnya itu maka pusat akan membuat model tingkat kesejahteraan kabupaten kota yang berbeda-beda modelnya. Baru nanti diperingkat mulai dari kaya sampai miskin.”⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasanya BPS akan turun kelapangan untuk menilai terkait dengan kemiskinan di kabupaten kota. Data yang diambil berdasarkan dengan data dari kadus. Penilaian baru dilakukan berdasarkan data tersebut. Berdasarkan hasil penilaian itu, maka pemerintah baru bisa menilai dan menentukan akan penduduk miskin. Disinilah penentuan kebijakan apa yang harus diambil oleh pemerintah. Sehingga seperti yang penulis jelaskan diatas, ada strategi penyelesaian kemiskinan.

3.2 Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pidie Dalam Menurunkan Angka Kemiskinan

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pidie dalam penanggulangan kemiskinan merupakan hasil dari berbagai penelusuran dan kajian-kajian sehingga melahirkan kebijakan-kebijakan tersebut yang diharapkan agar dapat menyelesaikan permasalahan kemiskinan di Kabupaten Pidie. Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua DPRK Pidie yang menyebutkan bahwa:

“Kita selaku legislatif terus mengupayakan untuk mengatasi kemiskinan di Pidie. Kan beda daerah beda permasalahannya, jadi memang kita akan terus mendongkrak dengan peran kami selaku DPR sehingga bersama dengan eksekutif dan pihak lainnya dapat mencari solusi dan mengagendakan program terkait.”⁷

⁵ Wawancara dengan Isma selaku bidang data BPS Aceh pada tanggal 6 Oktober 2022 pukul 14.00 WIB

⁶ Wawancara dengan Isma selaku bidang data BPS Aceh pada tanggal 6 Oktober 2022 pukul 14.00 WIB

⁷ Wawancara dengan Mahfuddin Ismail selaku Ketua DPRK Pidie pada 25 April 2024 di Kabupaten Pidie.

Dalam pengentasan kemiskinan, diperlukan perhatian dan kerjasama semua pihak, baik eksekutif, legislatif, LSM, Akademisi dan *stakeholder* lainnya sehingga dalam perumusan kebijakan dapat menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan penyelesaian permasalahannya. Kebijakan pemerintahan Kabupaten Pidie telah dirumuskan berupa strategi penyelesaian kemiskinan yang kemudian di adopsi dalam berbagai program pemerintah.

Adapun kebijakan-kebijakan tersebut telah disusun oleh Pemerintah untuk dapat diimplementasikan oleh semua Pemangku Kebijakan dan *stakeholder* lainnya. Kebijakan tersebut diurai dalam berbagai strategi dan program pelaksanaan terkait dengan kemiskinan. Strategi dan program dari kebijakan tersebut kemudian diturunkan kedalam berbagai program pelaksanaan sehingga program yang dijalankan terarah dan terkoordinasi dengan efektif dan efisien. Adapun implementasi dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Pidie dalam mengatasi kemiskinan antara lain yaitu sebagai berikut:

1. Ekonomi

Dalam bidang ekonomi, Pemerintah Kabupaten Pidie melaksanakan berbagai program dimana merupakan turunan dari kebijakan yang telah diambil oleh Pemerintah Pidie, diantaranya yaitu:⁸

- a. Pembangunan dan pemberdayaan Bumdes dan BKAD.
- b. Fasilitasi pengembangan usaha usaha ekonomi masyarakat dan PAD.
- c. Bantuan langsung tunai (Dana Desa).
- d. Pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera.
- e. Kebijakan teknis ketahanan ekonomi, sosial dan budaya.
- f. Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.
- g. Perencanaan dan pembangunan industry.
- h. Pengadaan alat tangkat ikan dan pukat darat bagi kelompok nelayan.
- i. Pengadaan boat nelayan dan fiber.
- j. DSB

2. Kesehatan

Dalam bidang kesehatan, Pemerintah Kabupaten Pidie melaksanakan berbagai program dimana merupakan turunan dari kebijakan yang telah diambil oleh Pemerintah Pidie, diantaranya yaitu:⁹

- a. Pengelolaan kesehatan ibu bersalin.
- b. Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat.
- c. Rehab sosial dasar penyandang disabilitas dan anak.
- d. Rehab sosial penyandang PMKS.
- e. Layanan rujukan lanjutan bagi perempan korban kekerasan.

⁸ Dokumen Realisasi Kegiatan Kemiskinan Pidie 2021-2022, diambil pada Kantor Bappeda Kabupaten Pidie.

⁹ Dokumen Realisasi Kegiatan Kemiskinan Pidie 2021-2022, diambil pada Kantor Bappeda Kabupaten Pidie.

- f. DSB

3. Pendidikan

Dalam bidang pendidikan, Pemerintah Kabupaten Pidie melaksanakan berbagai program dimana merupakan turunan dari kebijakan yang telah diambil oleh Pemerintah Pidie, diantaranya yaitu:¹⁰

- a. Pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil (KAT).
- b. Pengelolaan Dana Bos sekolah dasar dan menengah pertama.
- c. Pengelolaan Dana BOP PAUD.
- d. Sekolah lapang kelompok tani.
- e. Pemberdayaan dan pendidikan santri.
- f. Pemberian bantuan pembiayaan untuk dayah.
- g. Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN.
- h. DSB

4. Pangan

Dalam bidang pangan, Pemerintah Kabupaten Pidie melaksanakan berbagai program dimana merupakan turunan dari kebijakan yang telah diambil oleh Pemerintah Pidie, diantaranya yaitu:¹¹

- a. Menjaga stabilitas pangan.
- b. Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian.
- c. Pembangunan irigasi air tanah dalam dan dangkat (sektor pangan).
- d. Pengadaan pupuk untuk kelompok tani.
- e. Pengembangan pekarangan pangan lestari.
- f. DSB

5. Infrastruktur Dasar

Dalam bidang Infrastruktur Dasar, Pemerintah Kabupaten Pidie melaksanakan berbagai program dimana merupakan turunan dari kebijakan yang telah diambil oleh Pemerintah Pidie, diantaranya yaitu:¹²

- a. Pembangunan rumah layak huni.
- b. Rehabilitas rumah tidak layak huni.
- c. Pengadaan sambungan listrik RTM
- d. Pembangunan fasilitas MCK komunal.
- e. Rehabilitasi embung.
- f. Pembangunan jalan usaha tani.

¹⁰ Dokumen Realisasi Kegiatan Kemiskinan Pidie 2021-2022, diambil pada Kantor Bappeda Kabupaten Pidie.

¹¹ Dokumen Realisasi Kegiatan Kemiskinan Pidie 2021-2022, diambil pada Kantor Bappeda Kabupaten Pidie.

¹² Dokumen Realisasi Kegiatan Kemiskinan Pidie 2021-2022, diambil pada Kantor Bappeda Kabupaten Pidie.

g. DSB

Demikian program yang dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Pidie sebagai tindak lanjut dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam mengatasi kemiskinan. Adapun program yang dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Pidie tersebut memiliki korelasi dengan teori yang dikemukakan oleh Dunn tentang tahapan penyusunan kebijakan yaitu pada poin implementasi kebijakan. Pemerintah setelah melaksanakan penentuan kebijakan apa yang dipilih, kemudian mengimplementasikan kebijakan tersebut dalam bentuk program yang dijalankan oleh pihak berwenang. Dalam menyelesaikan persoalan kemiskinan di Kabupaten Pidie, berbagai pihak menjalankan fungsinya untuk merealisasikan program turunan dari kebijakan dari Pemerintah Pidie.

Jika ditinjau lebih mendalam tentang implementasi dari kebijakan tersebut, Pemerintah Pidie telah menyusun berbagai program yang dapat dijalankan oleh seluruh pihak terkait untuk mendorong agar kebijakan yang diambil oleh pemerintah tepat sasaran dan diupayakan maksimal. Pemerintah Pidie mengimplementasikan kebijakannya berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Pada indikator ini, pemerintah menjalankan berbagai program sebagai tindak lanjut dari kebijakan seperti: pemberian bantuan pupuk, pengadaan sumur bor, pembangunan jalan, beasiswa kepada anak yatim piatu dan miskin, jaminan kesehatan kepada masyarakat, pengadaan lahan, pemberdayaan ekonomi, dan sebagainya. Hasil wawancara yang penulis lakukan, penulis menyimpulkan bahwa sejauh ini, ada berbagai program yang dijalankan oleh pemerintah Pidie dalam menyelesaikan kemiskinan. Pemerintah melaksanakan terobosan-terobosan demi mengupayakan kemiskinan ini dapat diatasi seperti program pendidikan, pangan, infrastruktur, ekonomi dan lain sebagainya. Namun, sejauh ini Pidie masih dilanda kemiskinan, hal ini juga disebabkan oleh kebijakan yang masih belum sepenuhnya terintegrasi dengan baik. Masih terdapat aliran anggaran yang digunakan untuk belanja birokrasi, tidak terarahnya program yang dijalankan. Hal ini menjadi suatu permasalahan lain namun berdampak kepada percepatan pengentasan kemiskinan.

Wawancara yang penulis lakukan secara acak kepada masyarakat di beberapa kabupaten kota dapat menghasilkan bahwa terdapat masyarakat miskin yang setiap tahun berada pada garis kemiskinan. Di Pidie, masih terdapat masyarakat pengangguran, pendidikan yang rendah dalam masyarakat, bahkan ada masyarakat dengan umur yang sudah tua namun bertahan hidup dengan kerja keras hari demi ke hari. Tentunya fenomena ini merupakan satu permasalahan yang ironis di Pidie. Secara umum, penulis menyimpulkan bahwa pemerintah Pidie telah bekerja dengan maksimal untuk penurunan kemiskinan, berbagai program juga sudah dirasakan oleh masyarakat seperti bantuan-bantuan, pembangunan, pemberdayaan dan lain sebagainya. Namun hal tersebut belum sepenuhnya menyentuh kepada seluruh masyarakat miskin sehingga dibutuhkan kinerja yang lebih maksimal dari seluruh pihak baik pemerintah atau stakeholder bahkan masyarakat Pidie sendiri untuk sama-sama mendukung kebijakan pemerintah Kabupaten Pidie dalam mengatasi kemiskinan.

4. Penutup

Berdasarkan hasil uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kebijakan Pemerintah Pidie dalam mengatasi kemiskinan disusun dalam berbagai strategi yaitu Strategi Khusus yakni: Tepat Fokus, Tepat Lokus, Tepat Modus, Tepat Sasaran, Tepat Jumlah dan Tepat Waktu. Kebijakan yang diambil meliputi dimensi yang dianggap menjadi indikator kemiskinan yakni dimensi kesehatan, pangan, infrastruktur, ketenagakerjaan dan pendidikan.
2. Implementasi kebijakan Pemerintah Pidie dalam mengatasi kemiskinan disusun berdasarkan indikator yang telah ditetapkan antara lain yaitu: Bidang ekonomi seperti penyediaan lahan individu, pengadaan sarana dan prasarana teknologi dan sebagainya. Bidang pendidikan didalamnya seperti beasiswa bagi anak/yatim miskin, pembangunan Gedung sekolah, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal dan lainnya. Bidang kesehatan seperti jaminan kesehatan masyarakat Pidie, bantuan alat penyandang disabilitas, layanan rujukan rumah sakit dan sebagainya. Bidang pangan seperti pengembangan wilayah Kawasan, pengembangan desa mandiri, operasi pasar dan sebagainya. Selanjutnya yang terakhir yaitu bidang infrastruktur dasar seperti pembangunan jalan, pembangunan jembatan, rumah layak huni dan lain sebagainya.

5. Referensi

- Badan Pusat Statistik Aceh. 2022. "Profil Kemiskinan Penduduk di Provinsi Aceh Maret 2022." BPS Aceh. 2022. <https://aceh.bps.go.id/pressrelease/2022/07/15/702/profil-kemiskinan-penduduk-di-provinsi-aceh-maret-2022.html#:~:text=Selama periode September 2021-Maret,menjadi 10%2C31 persen>.
- Fachrudin, Reza. 2015. "Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah Kota Balikpapan." *Jurnal Ilmu Sosial Politik* 4 (2): 327–38.
- Huraerah, Abu. 2013. "Strategi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia." *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 12 (1): 1–13.
- Itang. 2015. "Faktor faktor penyebab kemiskinan." *Tazkiya* 16 (1): 1–30.
- Nasution, L N, D P Nasution, dan A I F Lubis. 2020. "Efektivitas Kebijakan Fiskal Dan Moneter Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Utara." *JEpa* 5 (1): 1–5. <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/856>.
- Novita, Ifit, Lilla Puji Lestari, Dedy Wijaya Kusuma, Siti Mafulah, Diah Puji Nali Brata, Karwanto, Supriyono, et al. 2022. *Metode Penelitian Kualitatif*. Diedit oleh Hayat. 1 ed. Malang: Unisma Press.
- Pidie, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten. 2022. "Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2022-2026." In , 1–154. Pidie: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pidie.
- Purwanto, Erwan Agus. 2007. "Mengkaji Potensi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk pembuatan Kebijakan Anti Kemiskinan." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 10 (3): 295–324.
- Rachman, Nisa Agistiani. 2014. "Pengukuran Kinerja Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Desa Wisata Brayut." *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)* 18 (2): 147–60.
- Raco. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Grasindo: Jakarta.

- Sugiarto, Eko. 2015. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi Dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TKP2K) Aceh. 2018. *Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Aceh (SP2KA) Tahun 2019-2022*. Banda Aceh: TKP2K Aceh.
- . 2019. *Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2019*. Banda Aceh: TKP2K Aceh.